

Government: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*
Volume 10, Nomor 2, Juli 2017 (115-127)
ISSN 1979-5645, e-ISSN 2503-4952

Analisis Hubungan Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale Indonesia Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Luwu Timur

Arya Utama

(Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

A. Murfhi

(Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)

Email: aryautama13@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the relationship between government, private, and community partnership in the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs of PT. Vale Indonesia Education and Health field in East Luwu Regency as well as influential factors in it. The research method used is qualitative research by parsing data descriptively. Data collection technique is done by observation, interview, literature study, and documentation by using qualitative descriptive analysis technique. The results of this study indicate that partnerships built in the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) between the Government, Private and society especially in the field of education and health is not maximized. This can be seen from the communication between the two actors in the cooperation run harmoniously and lasted in two direction. However, such cooperation is not written into the Memorandum of Understanding (MoU), so partnership is false. The pattern of partnership that is built is certainly influenced by several factors that support or inhibit. Supporting factors include policies related to Corporate Social Responsibility (CSR), Government involvement, private, and community as actors in the management of CSR programs. Inhibiting factors include Communication and Related Coordination of CSR Program in the Education and Health Sector.

Keywords : *partnership analysis, local government, vale Indonesia*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan program – program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Vale Indonesia bidang Pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur serta faktor yang berpengaruh didalamnya. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka, serta dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan yang terbangun dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jalinan komunikasi antara kedua aktor dalam kerjasama tersebut berjalan harmonis dan berlangsung secara dua arah. Namun, kerjasama tersebut banyak yang tidak dituangkan secara tertulis ke dalam Memorandum of Understanding (MoU), sehingga kemitraan bersifat semu. Pola kemitraan yang terbangun tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendukung

maupun menghambat .Faktor pendukung meliputi kebijakan terkait Corporate Social Responsibility (CSR) , Keterlibatan pemerintah, swasta , dan masyarakat sebagai aktor dalam pengelolaan program CSR . Faktor penghambat meliputi Komunikasi dan Koordinasi terkait Program CSR disektor Pendidikan dan Kesehatan.

Kata kunci: analisis kemitraan, pemerintah daerah, vale Indonesia

PENDAHULUAN

Dewasa ini masalah sosial dan lingkungan yang tidak diatur dengan baik oleh perusahaan ternyata memberikan dampak yang sangat besar, bahkan tujuan meraih keuntungan dalam aspek bisnis malah berbalik menjadi kerugian yang berlipat. Oleh karena itu masalah pengelolaan sosial dan lingkungan untuk saat ini tidak bisa menjadi hal marginal, ditempatkan pada tahap kuratif atau aspek yang tidak dianggap penting dalam beroperasinya perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan aspek penting yang harus dilakukan perusahaan dalam operasionalnya.

Hal tersebut bukan semata-mata memenuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) Pasal 74 ayat (1) UU PT berbunyi, "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan." Secara logis terdapat hukum sebab akibat, dimana ketika operasional perusahaan memberikan dampak negatif, maka akan muncul respon negatif yang jauh lebih besar dari masyarakat maupun lingkungan yang dirugikan.

Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar, sehingga diharapkan pelaksanaan CSR selain memberdayakan masyarakat setempat juga sebagai upaya agar operasional di perusahaan berjalan lancar tanpa gangguan, hal ini di atur dalam UU Minerba Tahun 2009 Pasal 108 ayat (1) menyebutkan bahwa

"Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat." CSR diharapkan sebagai sarana hubungan yang saling berkaitan antara perusahaan dan masyarakat setempat dalam menjalankan usaha demi penekanan masalah di sekitar perusahaan. CSR merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan TJSP dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi sosial, lingkungan.

Istilah CSR di Indonesia sebenarnya secara tidak langsung telah dikenal dan diterapkan dalam istilah gotong royong. Gotong royong itu sendiri muncul sebagai wujud interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia. Soerjono Soekanto mengartikan gotong royong sebagai kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa adanya interaksi sosial maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama.

Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa perusahaan harus melaksanakan CSR, khususnya terkait dengan perusahaan ekstraktif :

Pertama, perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul

ketidaknyamanan (discomfort) pada masyarakat.

Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya izin untuk melakukan operasi yang sifatnya kultural. Wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.

Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Sorowako merupakan salah satu daerah di Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki perusahaan tambang nikel. Perusahaan tambang nikel tersebut inilah yang kemudian dikenal dengan nama PT Vale Indonesia Tbk. Sebagai perusahaan yang telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 40 Tahun, sudah sewajarnya apabila PT Vale Indonesia Tbk merasa turut bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Perusahaan tambang inilah yang menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat Kabupaten Luwu Timur mengingat banyaknya anggaran yang dikeluarkan PT Vale Indonesia Tbk. dalam membantu program-program pemerintah Sulawesi Selatan untuk mengembangkan masyarakat di sekitarnya. (PT Vale Indonesia Tbk: 2011)

Pelaksanaan program CSR merupakan bentuk program pemerintah yang terkonsip dalam negara kesejahteraan serta salah satu wujud tanggung jawab eksternal di PT Vale Indonesia sebagai perusahaan swasta dalam

pelaksanaan CSR/TJSL yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai wujud pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, dalam praktiknya keberadaan PT Vale Indonesia sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan kesejahteraan di Kabupaten Luwu Timur, Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur 2016-2021 yang selaras dengan program PT.Vale Indonesia yaitu Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM) yang diluncurkan pada Januari 2014, yang merupakan program kemitraan antara Pemerintah, PT Vale Indonesia, dan Masyarakat. Tetapi dalam implementasinya masih terdapat pro dan kontra terhadap pelaksanaan program PTPM tersebut dikarenakan dalam tahap pelaksanaannya masih terjadi tumpang-tindih program pembangunan antara pihak PT Vale Indonesia dan Pihak Pemerintah Kabupaten, serta dampak secara langsung ke masyarakat belum dirasakan merata dan nyata. Kondisi ini menjadi menarik untuk dianalisis dalam Skripsi ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu menganalisis lebih lanjut mengenai kemitraan dalam pelaksanaan program CSR PT. Vale Indonesia, Sehingga Peneliti akan mengambil judul penelitian mengenai : "Analisis Hubungan Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Vale Indonesia Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Luwu Timur".

Untuk itu, penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pola dan jenis kemitraan antara pemerintah , swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan program – program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Vale

Indonesia bidang Pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mengumpulkan data dari informan tentang pokok persoalan yang diteliti. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang berusaha memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti dengan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini juga penulis menggunakan dua sumber data sebagai sumber data penelitian, yakni data primer dan data sekunder. Kedua data ini digunakan karena mendekati dengan objek penelitian yang penulis gunakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Coporate Social Responsibility (CSR) PT Vale Indonesia di Kabupaten Luwu Timur. Program pengembangan masyarakat PT Vale melalui Corporate Social Responsibility (CSR) kini diselaraskan dengan rencana pembangunan Pemerintah Daerah Luwu Timur, bersifat jangka panjang, dan memiliki roadmap lima tahunan. Pemda, Perusahaan, dan masyarakat penerima manfaat program akan berjalan bersama. Dengan demikian tidak terjadi tumpang-tindih program, tumpang-tindih dana, serta pemborosan waktu dan pekerjaan. Semua itu diwadahi dalam satu program yang dinamakan Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (PTPM).

PTPM adalah program pemberdayaan PT. Vale yang diperuntukkan terutama bagi masyarakat miskin yang ada disekitar area operasi PT. Vale. PTPM dilakukan dalam siklus waktu lima tahunan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat desa mandiri dibidang kesehatan, pendidikan, dan

pengembangan ekonomi, Kemitraan strategis yaitu peningkatan kapasitas institusional yang melingkupi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, serta kontribusi strategis lain berupa tanggap darurat, sosial, budaya dan donasi. Pada tahap awal, Rencana Pengelolaan Sosial PTPM disusun dalam periode lima tahun, yaitu tahun 2013-2017.

Pada Selasa 21 januari 2014, pemerintah kabupaten Luwu Timur bersama PT Vale Indonesia Tbk meluncurkan program baru yaitu PTPM (Program Terpadu Pengembangan Masyarakat). Program PTPM dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Momerandum Of Understanding antara Bupati Luwu Timur, ketua DPRD, dan President Direktur PT. Vale Indonesia Tbk

PTPM ini diharapkan dapat membantu Pemkab Luwu Timur dalam mewujudkan Luwu Timur sebagai Kabupaten agro industri, yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Oleh karena itu Implementasi program PTPM ini diharapkan berkontribusi besar, tidak hanya untuk pemberdayaan masyarakat dan lingkungan tetapi juga dalam skala yang lebih besar yaitu pembangunan daerah khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Program PTPM ini merupakan salah satu bentuk kontribusi PT Vale dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengaruh bagi masyarakat terhadap program PTPM ini dimana seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, dalam penggunaan dana sesuai dengan prioritasnya desanya

PTPM dijiwai oleh prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu partisipasi, kemitraan, transparansi, akuntabilitas, dan kemandirian. Dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. PTPM dilakukan dengan tiga pilar antara

Masyarakat, Pemerintah, dan Perusahaan. Prinsip utama dari PTPM adalah sinergi pembangunan berkelanjutan melalui alokasi sumber daya, baik oleh PT Vale, masyarakat, maupun pemerintah daerah.

Dengan PTPM, posisi masyarakat diharapkan semakin kuat, kelembagaan lokal semakin berkembang mendorong pembangunan partisipatif, dan membuat fungsi serta peran pemerintah lokal, PTPM merupakan babak baru untuk melihat sesuatu yang lebih baik dari pada sebelumnya. Inilah yang dinamakan sinergi tiga pilar Pemerintah, Perusahaan, dan masyarakat.

Sebelum meluncurkan PTPM, PT Vale memiliki program Community development (Comdev). Namun dalam pelaksanaan programnya tersebut dinilai kurang efektif dan kurang mampu memberdayakan masyarakat. Disharmonisasi perusahaan, masyarakat dan pemerintah daerah pun kerap terjadi.

PTPM kemudian dirancang lebih terarah, sistematis, sinergis dengan program pembangunan pemerintah dan memiliki panduan pelaksanaan yang baku berupa Rencana Pengelolaan Sosial Program Terpadu Pengembangan Masyarakat (RPS-PTPM). Dalam penyusunan RPS tersebut, PT Vale bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan serangkaian studi sosial, kajian pemangku kepentingan, kajian kebutuhan masyarakat hingga kajian profil dan potensi masyarakat dan daerah di Kabupaten Luwu Timur.

Sementara dalam pelaksanaan program PTPM tahun 2017 di kabupaten Luwu Timur Khususnya Kecamatan Nuha sudah berjalan dari tahun 2013-2017, terdapat tiga skema implementasi PTPM yaitu Program Mitra Desa Mandiri (PMDM), kemitraan Strategis, dan Kontribusi strategis

PTPM dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, dan kelompok rentan, dengan fokus

dukungan pada sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, ekonomi pada wilayah terdampak operasi pada empat kecamatan yakni Kecamatan Nuha, Kecamatan Towuti, Kecamatan Wasuponda, dan Kecamatan Malili.

Program PTPM sebagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk, yang di luncurkan sebagai perwujudan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang penyelenggaraannya bergantung pada ketersediaan anggaran dari Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk. Program PTPM telah di persiapkan cukup matang dan atas pertimbangan berbagai faktor, dimana hal tersebut telah tertuang dalam peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor 04 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah 2016-2021. Anggaran PTPM sekitar Rp. 40-50 Miliar per-tahun, tergantung harga nikel. Khusus untuk dana pembangunan desa atau dana untuk melaksanakan kegiatan tertentu sebesar Rp17 Miliar per-tahun. Ini terdiri dari Rp350 Juta per-desa dan Rp400 Juta per-kecamatan pada periode pelaksanaan 2014. Sedangkan untuk tahun 2015 menjadi Rp400 Juta per-desa dan Rp450 Juta per-kecamatan, di tahun 2016 dan 2017 anggaran untuk desa itu yakni Rp 300 juta per-desa. Dalam pelaksanaannya, PTPM juga berjalan berdasarkan prinsip-prinsip keberpihakan kepada masyarakat rentan, kaum miskin dan keberpihakan kepada kaum perempuan. Jadi PTPM merupakan bentuk kerja sama kemitraan antara Pemerintah Daerah, PT Vale Indonesia, dan Masyarakat guna mengoptimalkan partisipasi antar pelaku pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

PTPM terbagi menjadi tiga pilar, yaitu Program Mitra Desa Mandiri (PMDM), Strategic Partnership, dan Strategic Contributions. Melalui ketiga pilar tersebut, PT Vale berperan sebagai kontributor atau

fasilitator dalam mendukung upaya pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Berikut adalah skema pelaksanaan PTPM : (a) Program Mitra Desa Mandiri (PMDM). Program Mitra Desa Mandiri (PMDM), sebagai bagian dari PTPM, adalah pola dukungan PT Vale bagi wilayah terdampak operasi Perusahaan melalui kegiatan berbasis masyarakat. Wujudnya berupa dukungan dana stimulan bagi desa/kecamatan. Pada periode tahun 2017, PMDM berfokus pada bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.

Program ini pada dasarnya memberikan kemudahan dan kesempatan bagi setiap desa di empat kecamatan dalam area kegiatan PT Vale, untuk menentukan sendiri prioritas program/kegiatan pengembangan masyarakat. PMDM dilaksanakan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui prinsip-prinsip partisipatif, kemandirian, akuntabilitas, keterpaduan dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Di sisi lain sebagai bagian dari PTPM, pelaksanaan PMDM kian membuktikan bahwa mekanisme partisipasi memberikan ruang pengembangan kapasitas masyarakat sebagai motor penggerak program sekaligus menempatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan. Masyarakat tidak lagi menjadi penonton atau sekedar penerima manfaat, melainkan sebagai pelaku program pengembangan masyarakat.

Program yang direalisasikan di tiap desa merupakan hasil musyawarah masyarakat desa. Ketika program berjalan, masyarakat desa pula yang memonitor dan mendukung realisasinya. Tim koordinasi PTPM hanya bertugas sebagai fasilitator pelaksanaan program. Melalui mekanisme PMDM tersebut, di harapkan dapat mendorong masyarakat agar benar benar berdaya dan mandiri. Mereka dikondisikan untuk berpikir jangka panjang sehingga transformasi sosial yang ideal dapat tercapai

PMDM melalui mekanisme musyawarah pembangunan desa/kelurahan dengan mempertimbangkan keselarasan terhadap rencana pembangunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang telah ditetapkan. Dari hal itu, nilai-nilai integrasi dan keselarasan PMDM dengan pembangunan pemerintah. RPJMDes inilah yang menjadi rujukan pengusulan program PMDM masing-masing desa/kelurahan yang berisi kebutuhan desa/kelurahan

Jenis kegiatan yang difasilitasi PMDM bersifat terbuka (open menu). Masyarakat diberi ruang untuk menentukan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan ekonomi sesuai kebutuhan. Pelaksanaan PMDM diatur dalam Panduan Teknis Operasional (PTO) sebagai acuan, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, penguatan, dan pemeliharaan kegiatan. Adapun 17 tahapan pelaksanaan yang dimaksud adalah sebagai berikut : (1) Persiapan dan Sosialisasi. (2) Sosialisasi Penyedia Layanan (3) Musyawarah Desa Sosialisasi (4) Pelatihan kepada KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) terpilih (5) Perencanaan Kegiatan (6) Musyawarah Desa Penetapan Usulan Kegiatan (7) Musyawarah Desa Prioritas Usulan Kegiatan (8) Verifikasi Usulan Kegiatan (9) Musyawarah Desa Perencanaan dan Usulan Kegiatan (10) Pengorganisasian Kelompok Sasaran (11) Diskusi Terarah Kelompok (12) Pelaksanaan Kegiatan PMDM (13) Musyawarah Desa/Kecamatan Pertanggungjawaban (14) Musyawarah Desa/Kecamatan Serah Terima (15) Pemeliharaan Kegiatan (16) Monitoring Kegiatan (17) Evaluasi Kegiatan.

Sejak PTPM berjalan, khususnya PMDM yang punya mekanisme Bottom-up, setidaknya masyarakat sudah mengikuti mekanisme dan aturan yang ditetapkan. Partisipasi masyarakat cukup tinggi, meski dalam tahun pertama pelaksanaan masih terdapat beberapa desa yang belum

mengikuti secara utuh Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PMDM. Hal ini memang bukan hal yang mudah. Karena menyangkut kebiasaan lama, masyarakat perlu di beri waktu melakukan proses pembelajaran, sebab PMDM di maksudkan untuk perubahan mindset atau pola pikir terhadap program bantuan PT Vale sebelumnya.

Pada pelaksanaan periode 2017 anggaran yang di sediakan untuk bantuan ke desa/kelurahan yaitu sebesar 300 juta rupiah yang juga diatur dalam PTO PMDM. Anggaran tersebut dibagi ke beberapa sektor yaitu pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Pembagiannya itu berdasarkan kebutuhan masing-masing desa/kelurahan. Kegiatan PMDM diusulkan secara mandiri oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi pelaksanaan program. Tetapi dalam pelaksanaannya dengan anggaran 300 juta per tahun dianggap masih belum mampu memenuhi kebutuhan desa/kelurahan di Kecamatan Nuha khususnya di Desa Sorowako dan Kelurahan Magani. Karena bantuan anggaran dalam PMDM dinilai belum mampu untuk membangun desa sehingga desa/kelurahan belum mampu menjadi desa/kelurahan yang mandiri, disebabkan karena kebutuhan masyarakat di desa/kelurahan setiap tahunnya meningkat sehingga program yang dijalankan masih terbatas dan dampak dari pelaksanaan program belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Maka dari itu perlunya diadakan penambahan anggaran untuk bantuan desa/kelurahan.

Pola kemitraan antara Pemerintah, PT Vale, dan Masyarakat dalam pelaksanaan PMDM dinilai masih belum terjalin dengan baik, disebabkan karena kurangnya anggaran bantuan dan koordinasi dari masing-masing pihak pada taraf pelaksanaan. Sehingga di butuhkan penambahan anggaran, sebab bantuan yang di berikan nominalnya tetap sama tanpa memperhatikan kepadatan

penduduk, kondisi ekonomi. Kondisi kesehatan dan kondisi pendidikannya sehingga dampak pelaksanaan PMDM secara sosial belum merata dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat sorowako dan magani

Pelaksanaan PMDM dalam kurung waktu 5 tahun khususnya di desa sorowako dan kelurahan magani sudah tercapai namun pelaksanaannya masih belum maksimal, karena masih kurangnya komunikasi dan koordniasi dari pihak Pemerintah, PT Vale Indonesia dan masyarakat selaku unsur pelaksana. Terdapat pula beberapa poin rekomendasi untuk perbaikan implementasi program PTPM di masa depan, antara lain: (1) Penguatan komunikasi antar pihak PT Vale dan masyarakat agar menjadi lebih efektif, (2) Sinergi PMDM dan Anggaran Dana Desa (ADD), (3) Pengelolaan fasilitator program dan pionir-pionir sebagai perpanjangan tangan Perusahaan dalam hubungan dengan masyarakat melalui PTPM, (4) Pengembangan kapasitas elemen-elemen PMDM (fasilitator, komite desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa atau KPMD, serta tim Social Development Program PT Vale), (5) Revisi SOP untuk mendukung proses implementasi PTPM yang lebih baik, salah satunya mengenai monitoring & evaluasi, (6) Pendekatan yang lebih menekankan kepada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, (7) Usulan perbaikan sistem dalam pembagian dana PMDM per desa

Dari berbagai usulan diatas, Hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi kedepannya mengingat bahwa program PMDM telah berakhir dan untuk tahun 2018 telah disusun dan di bahas kembali program sosial yang akan dijalankan, maka dari itu perlunya di perkuat kembali pola kemitraan antara Pemerintah, PT Vale Indonesia dan masyarakat agar pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan bersama sehingga masyarakat yang ada dalam desa/kelurahan bisa merasakan dampak

secara langsung dari program tersebut dan membuat masyarakat desa menjadi masyarakat yang mandiri. (b) Kemitraan Strategis dan Kontribusi Strategis. Selain PMDM, PTPM memiliki pola dukungan yang dinamakan kemitraan strategis (*strategic partnership*) dan kontribusi strategis (*strategic contribution*). Ketiga pola tersebut berjalan beriringan. Jika kegiatan PMDM berangkat dari usulan masyarakat desa (*bottom up*), maka kegiatan dalam kemitraan strategis dan kontribusi strategis berangkat dari rencana kerja Pemerintah Daerah atau Perusahaan (*top down*). Acuanya adalah MOU, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), Rencana Pengelolaan Sosial (RPS) PT Vale Indonesia, dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk menetapkan program dan kegiatan prioritas serta menetapkan kerangka pendanaan. Dalam hal ini ada dokumen Kerjasama Operasional (KSO) guna memenuhi regulasi tata kelola Perusahaan, yang mensyaratkan dokumen tertulis ketika bekerjasama dengan pihak luar agar kegiatan berjalan transparan dan akuntabel. KSO berbasis kemitraan antara Tim PTPM PT Vale dan Tim SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait.

Melalui Program Kemitraan Strategis, PT Vale bersama Pemkab Lutim mewujudkan Program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB). Hingga kini sudah ada 109 petani yang membudidayakan padi organik di 7 kecamatan se-Luwu Timur dengan total area sawah 44,28 hektar. Bahkan padi dari Mahalona, Kecamatan Towuti, sudah mendapatkan sertifikat organik dari lembaga sertifikasi nasional INOFICE. Selain itu, Kemitraan Strategis juga memperkenalkan pengembangan dan pengolahan tanaman herbal demi menguatkan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM). Di sektor pendidikan, PT Vale meningkatkan kapasitas pendidik dan kependidikan tingkat PAUD hingga sekolah menengah atas melalui program magang,

studi banding, pembinaan teknis dan workshop yang dilakukan bekerja sama dengan Ikatan Guru Taman-taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Luwu Timur), serta bidang UKM yang telah dilakukan penguatan UKM olahan komoditas lokal sebagai cikal bakal industri pangan di Luwu Timur, edukasi ke pelaku usaha kecil untuk legalitas usaha, dan legalitas produk olahan agar dapat diterima oleh pasar.

Sedangkan dalam program Kontribusi Strategis, PT Vale memberikan donasi dan sponsorship dalam berbagai event kemasyarakatan dan perusahaan juga memberi bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam, baik di wilayah Luwu Timur maupun di wilayah lain di Indonesia.

Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala dalam proses kemitraan yang dijalankan seperti kurangnya komunikasi dan koordinasi Piiha Vale dengan pemerintah kabupaten dalam hal ini SKPD terkait program yang ingin di laksanakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pola kemitraan masih belum berjalan dengan baik disebabkan kurangnya komunikasi dan koordinasi yang bersangkutan dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan program bantuan yang berjalan, sehingga menyebabkan kurangnya peran SKPD terkait program yang ingin di laksanakan. Sehingga menjadi harapan kedepannya adalah program-program yang dijalankan adalah program yang bisa sinergis dengan program kerja Kabupaten dalam hal ini program yang belum di fasilitasi pemerintah kabupaten Luwu Timur serta pola komunikasi dan koordinasi secara intens bisa di tingkatkan lagi agar tercipta pola kemitraan yang baik antara Pemerintah Kabupaten dan PT Vale Indonesia sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat dapat merasakan secara langsung dampak dari bantuan CSR PT Vale Indonesia dalam bentuk program sosial.

Berdasarkan uraian skema pelaksanaan PTPM diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan program PTPM dalam bentuk kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, PT. Vale Indonesia Tbk, dan Masyarakat masih banyak yang perlu di perbaiki dari pola komunikasi, koordinasi dan pelaksanaannya, dimana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, PT. Vale Indonesia Tbk dan Masyarakat harus bekerja-sama dalam menyukseskan CSR PT Vale Indoneia dalam program sosial kedepannya, sehingga apapun yang di bangun dari pelaksanaan sebelumnya dapat di lanjutkan denga pola kemitraan yang baik. Secara umum, hasil assessment yang telah dilakukan menyatakan bahwa PTPM telah berhasil membangun fondasi dan sistem kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan PT Vale dengan pendekatan musyawarah dalam implementasi PTPM. PMDM, salah satu komponen PTPM, mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan melibatkan perwakilan masyarakat, komite, dan kader desa, walaupun dalam pelaksanaannya di nilai masih kurang maksimal. Mengingat bahwa PTPM yang memiliki roadmap 5 tahunan telah berakhir dan telah di susun kembali bantuan CSR PT Vale Indonesia dalam program sosial yang baru bernama Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) peroid 2018 sd 2022.

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa kemitraan yang terbangun antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk dan Masyarakat dalam pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah pola kemitraan Pola Kemitraan Produktif, dimana pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam paradigma commont interest. Prinsip simbiosis mutualisme sangat kental pada pola ini. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah

memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan. Bahkan bisa jadi mitra dilibatkan pada pola hubungan resourced based patnership, dimana mitra diberi kesempatan menjadi bagian dari shareholders. Tetapi masih tergolong dalam jenis kemitraan Potential Partnership, pada jenis kemitraan ini pelaku kemitraan saling peduli satu sama lain tetapi belum bekerja bersama secara lebih dekat dan jenis Nascent Partnership dimana Kemitraan ini pelaku kemitraan adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal.

Pola Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pelaksanaan CSR Bidang Pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang handal. Hal ini disebabkan karena banyak yang beranggapan bahwa bangsa yang mempunyai SDM yang handal dan berkualitas akan lebih mampu bersaing dalam perekonomian dunia. Dalam kaitan ini, salah satu komponen yang berkaitan langsung dengan peningkatan SDM adalah pendidikan. Karena itu, kualitas SDM selalu diupayakan untuk ditingkatkan melalui pendidikan yang berkualitas, demi tercapainya tujuan pembangunan Indonesia yang tertera dalam UUD 45 dan amandemennya. Bantuan dalam bidang pendidikan menjadi salah satu program prioritas dalam pemenuhan visi Luwu Timur Terkemuka 2021.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, Selain sarana dan prasarana, kemampuan membaca dan menulis juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan, Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan itu, kualitas SDM selalu diupayakan untuk ditingkatkan melalui

pendidikan yang berkualitas, demi tercapainya keberhasilan pembangunan. Sementara guna mencapai kualitas pendidikan yang diinginkan diperlukan sarana dan prasarana serta unsur penunjang lainnya dalam proses pendidikan.

Di sektor pendidikan pola kemitraan yang terbangun antara Pemerintah, PT Vale Indonesia dan Masyarakat terkait bantuan CSR dalam hal ini Program PTPM PT Vale Indonesia sektor pendidikan di Kecamatan Nuha khususnya di Desa Sorowako dan Kelurahan Magani di wujudkan melalui PMDM dan Kemitraan strategis. Di PMDM sendiri bentuk bantuan dalam sektor pendidikan hanya terfokus pada Pendidikan Anak Usia Dini, karena berangkat dari sinergitas program Pemerintah Kabupaten yaitu satu desa satu PAUD. Pelaksanaan di bidang PAUD pun dinilai masih sangat kurang dalam hal pendanaan sebab pendanaan tersebut masih belum cukup untuk membangun sarana dan prasarana terkait PAUD di Kecamatan Nuha khususnya Desa sorowako dan Kelurahan Magani di karenakan pendanaan tersebut tidak hanya di fokuskan ke sektor pendidikan saja sehingga dalam pelaksanaannya belum terjalankan secara maksimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa bantuan di sektor pendidikan masih belum maksimal di sebabkan masih terbatasnya anggaran bantuan yang di berikan sehingga hanya sedikit program yang bisa di jalankan dalam rangka pemenuhan saran dan prasarana khususnya di bidang PAUD di Desa Sorowako dan Kelurahan Magani dan dampak pelaksanaannya pun kerap kurang di asakan masyarakat.

Sedangkan pola kemitraan yang di wujudkan dalam program kemitraan strategis untuk bantuan sektor pendidikan pelaksanaannya itu berupa bantuan langsung dari pihak Vale seperti renovasi sekolah, transportasi sekolah, pemberian beasiswa, pengadaan perpustakaan desa serta pelatihan guru PAUD

Untuk beasiswa sendiri dalam kemitraan strategis bantuan beasiswa untuk pendidikan tinggi itu langsung diberikan kepada masyarakat sesuai dengan syarat yang di tetapkan oleh PT Vale Indonesia. Tetap dalam pemberian bantuan beasiswa untuk jenjang S1,S2 dan S3 masih dinilai tidak adil karena yang di perioritaskan itu anak karyawan PT Vale Indonesia sehingga hanya sedikit warga lokal yang mendapatkan beasiswa karena ketatnya persaingan. Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam proses kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dan PT Vale indonesia belum terjalin dengan baik disebabkan karena kuranya pola komunikasi dan koordniasi terhadap pemberian bantuan beasiswa di sektor pendidikan. Sehingga dalam pemberian program beasiswa agak melenceng karena masih di priorotaskan untuk anak karyawan maupun masyarakat di luar Kabupaten Luwu Timur. Hal tersebut di anggap melenceng dari tanggung jawab perusahaan Karen pemberian beasiswa yang menjadi salah satu patokannya adalah nilai akademik, dan hal itu dinilai sangat susah untuk masyarakat desa sorowako dan kelurahan magani karena susahnya mereka bersaing dengan anak-anak daerah lain yang tingkat pendidikannya sudah maju. Sehingga masyarakat desa sorowako dan kelurahan magani kurang puas dalam pemberian beasiswa di sektor pendidikan disebabkan karena tidak meratanya bantuan beasiswa tersebut yang hanya di peruntuhkan untuk anak karyawan PT Vale sehingga hanya sebageian kecil masyarakat yang dapat merasakan bantuan beasiswa tersebut.

Hal tersebut dianggap menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan PT Vale yang seharusnya berkolaborasi sebisa mungkin memprioritaskan bantuan beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu khususnya desa sorowako dan kelurahan magani agar anak-anak disana dapat bersaing dengan anak-anak di wilayah kota yang sistem pendidikannya sudah sangat maju.

Terlepas dari program kemitraan strategis di sektor pendidikan, PT Vale Indonesia membangun sekolah dalam bentuk Yayasan Pendidikan Sorowako (YPS) yang terdiri dari TK, SD, SMP dan SMA dan diperuntukkan untuk anak karyawan walaupun secara umum terbuka untuk masyarakat tetapi masih sangat minim karena biaya pendidikan yang cukup mahal.

Adapun kemitraan yang terbangun antara Pemerintah Kabupaten dengan PT Vale Indonesia di sektor pendidikan adalah pola kemitraan yang bersifat Pola Kemitraan Produktif yang menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam paradigma *commont interest*. Prinsip simbiosis mutualisme sangat kental pada pola ini. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan. Bahkan bisa jadi mitra dilibatkan pada pola hubungan *resourced based patnership*, dimana mitra diberi kesempatan menjadi bagian dari *shareholders*. Sebagai contoh, mitra memperoleh saham melalui *stock ownership Program*. Tetapi dalam pelaksanaannya masih tergolong jenis kemitraan *Nascent Partnership* dimana Kemitraan ini pelaku kemitraan adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal. Sehingga dampak yang timbulkan untuk bantuan di sektor pendidikan terhadap masyarakat masih belum merata, hal ini kemudian akan menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki pola kemitraan antar Pemerintah Kabupaten dan PT Vale Indonesia khususnya di sektor pendidikan.

Pola Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pelaksanaan CSR Bidang Kesehatan. Salah satu komponen pembangunan manusia dalam rangka menciptakan SDM yang berkualitas adalah masalah kesehatan. Peningkatan mutu kesehatan tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan yang memadai.

Di sektor kesehatan sendiri pola kemitraan yang terbangun antara Pemerintah, PT Vale Indonesia dan Masyarakat dari segi bantuan CSR dalam hal ini PTPM PT Vale Indonesia juga diwujudkan melalui skema pelaksanaan PMDM dan Kemitraan Strategis. Pelaksanaan bantuan CSR di sektor kesehatan programnya masih terbatas pada perbaikan posyandu, pembuatan drenase dan kebanyakan masih dalam penyuluhan kesehatan. Hal ini disebabkan karena minimnya anggaran yang diberikan kepada Desa/Kelurahan di sektor kesehatan.

Pelaksanaan bantuan PTPM di sektor kesehatan melalui PMDM di Kecamatan Nuha khususnya Desa Sorowako dan Kelurahan Magani masih terbilang belum cukup maksimal karena masih terbatasnya program yang dijalankan disebabkan karena minimnya pendanaan yang di alokasikan ke sektor kesehatan yang berdampak pada program-program kesehatan yang dijalankan pun terbatas. Adapun program yang telah berjalan di Desa Sorowako dan Kelurahan Magani yaitu Pembangunan Jamban, Jumantik, Pembangunan Drenase, Renovasi Posyandu dan Pemenuhan kebutuhan posyandu.

Terlepas dari hal itu, PT Vale membangun Rumah Sakit Swasta yang bernama Rumah Sakit PT Vale Indonesia, yang awalnya hanya diperuntukkan untuk karyawan Vale. Tetapi ada kemitraan yang terbangun dengan pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maka Rumah sakit pun terbuka secara umum walaupun masih sangat terbatas. Walaupun ada kemitraan yang terbangun dalam hal ini BPJS, ternyata hal tersebut masih di prioritaskan untuk karyawan PT Vale Indonesia. Untuk masyarakat umum bisa berobat di rumah sakit Vale ketika ada rujukan dari puskesmas dan biaya berobatnya pun cukup mahal untuk masyarakat yang ada di Desa Sorowako dan Kelurahan Magani.

Rumah sakit yang dibangun PT Vale Indonesia mulanya hanya untuk karyawan vale saja tetapi setelah terbentuknya kemitraan antara Pemerintah dan pihak PT Vale dalam hal ini BPJS dengan bentuk membuat loket pelayanan BPJS di rumah sakit vale, maka masyarakat mulai bisa mengakses dan mendapatkan layanan dari pihak rumah sakit vale ini. Walau pun dalam pelaksanaannya di anggap masih sangat terbatas.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah, PT Vale Indonesia dan masyarakat dalam program bantuan sosial di sektor kesehatan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Hal tersebut ditunjukkan dalam pelaksanaannya bahwa sangat terbatasnya anggaran pendanaan sehingga banyak program kesehatan yang tidak berjalan, serta rumah sakit yang dibangun vale walaupun terbuka secara umum dengann bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini BPJS juga masih di prioritaskan untuk karyawan vale.

Adapun pola kemitraan yang terbangun masih bersifat pola kemitraan Pola Kemitraan Semiproduktif dimana Dalam skenario ini pemerintah dan komunitas atau masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah diluar perusahaan. Perusahaan tidak tahu program-program pemerintah, pemerintah juga tidak memberikan iklim yang kondusif kepada dunia usaha dan masyarakat bersifat pasif. Pola kemitraan ini masih mengacu pada kepentingan jangka pendek dan belum atau tidak menimbulkan sense of belonging di pihak masyarakat dan low benefit dipihak pemerintah. Kerjasama lebih mengedepankan aspek karitatif atau public relation, dimana pemerintah dan komunitas atau masyarakat masih lebih dianggap sebagai objek. Dengan kata lain, kemitraan masih belum strategis dan masih mengedepankan kepentingan sendiri (self interest) perusahaan, bukan kepentingan

bersama (commont interest) antara perusahaan dengan mitranya. Dan dalam pelaksanaan kemitraan tersebut masih tergolong jenis kemitraan Nascent Partnership dimana Kemitraan ini pelaku kemitraan adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal

KESIMPULAN

Program PTPM yang memiliki skema pelaksanaan yaitu PMDM, Kemitraan Strategis dan Kontribusi Strategis, merupakan salah satu mekanisme kontribusi PT. Vale Indonesia Tbk, dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam implementasi CSR PT.Vale Indonesia Tbk, dengan mendorong keterlibatan masyarakat yang dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal dan juga masih belum menyakinkan, meskipun program tersebut memberikan dampak positif bagi sebagian masyarakat setempat. Jadi di butuhkan perbaikan pola kemitraan kedepannya agar tercipta masyarakat yang mandiri dalam hal ini ketika perusahaan sudah berhenti beroperasi masyarakat sudah bisa hidup dengan mandiri tanpa bergantung lagi dengan perusahaan.

Pola Kemitraan yang terbangun antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur,Perusahaan PT. Vale Indonesia Tbk dan Masyarakat dalam pelaksanaan Corporate social Responsibility (CSR) bidang Pendidikan dan Kesehatan adalah sebagai berikut: (a) di sektor Pendidikan pola kemitraan yang terbangun adalah pola kemitraan produktif, dimana pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam paradigma commont interest. Prinsip simbiosis mutualisme sangat kental pada pola ini. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat memberikan dukungan positif kepada perusahaan. Bahkan bisa jadi mitra dilibatkan pada pola hubungan

resourced based patnership, dimana mitra diberi kesempatan menjadi bagian dari shareholders. Tetapi masih tergolong dalam jenis kemitraan Nascent Partnership dimana Kemitraan ini pelaku kemitraan adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal. (b) Kesehatan. di sektor Kesehatan pola kemitraan yang terbangun adalah pola kemitraan semiproduktif dimana dalam skenario ini pemerintah dan komunitas atau masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah diluar perusahaan. Perusahaan tidak tahu program-program pemerintah, pemerintah juga tidak memberikan iklim yang kondusif kepada dunia usaha dan masyarakat bersifat pasif. Pola kemitraan ini masih mengacu pada kepentingan jangka pendek dan belum atau tidak menimbulkan sense of belonging di pihak masyarakat dan low benefit dipihak pemerintah. Kerjasama lebih mengedepankan aspek karitatif atau public relation, dimana pemerintah dan komunitas atau masyarakat masih lebih dianggap sebagai objek. Dengan kata lain, kemitraan masih belum strategis dan masih mengedepankan kepentingan sendiri (self interest) perusahaan, bukan kepentingan bersama (commont interest) antara perusahaan dengan mitranya. Dan dalam pelaksanaan kemitraan tersebut masih tergolong jenis kemitraan Nascent Partnership dimana Kemitraan ini pelaku kemitraan adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards III, G. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press
- Jafar Hafsah, M. *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, (1999)
- Levinger, B. (2004). *A Partnership Model for Public Health: Five Variables for productive Collaboration*. Washington,DC: Pact Publications
- Meter, D. *The Policy Implementation Process*. Sage Publication: Beverly Hill.
- Mia Nur damayanti, *Kajian Pelaksanaan Kemitraan* IPB Press, Bogor, (2009)
- Suharto Edi, (2010). *CSR & Comdev Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi* Sulistiyani. A. *Gaya Media*.Yogyakarta. (2004).
- Surmayadi, I. (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama
- Hendrik budi,. (2008). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Sinar Grafika
- Halim, A. (2014). *Analisis Investasi dan Aplikasinya: Dalam Aset Keuangan dan Aset Riil*. Jakarta : Salemba Empat
- Luankali, B. (2007). *Analisis Kebijakan Publik dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: AMELIA.
- Prabu, A. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Syaukani, A. (2004), *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sunyoto, U. (2004). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Wibawa, S. (2002). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Wahab Abdul, S. (2005). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Wibisono. Y. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Fascho Publishing. Gresik. (2007)